



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BUKU PANDUAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(MUSRENBANGNAS)

DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2011

TEMA:

“PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG
PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH”

JAKARTA, 28 APRIL - 1 MEI 2010



Republik Indonesia
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN), salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam Pasal 20 Ayat 1 UU-SPPN diatur bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Rancangan RKP tersebut memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro dan pendanaan, indikasi program Kementerian/Lembaga, program lintas Kementerian/Lembaga dan program lintas wilayah, serta kaidah pelaksanaan.

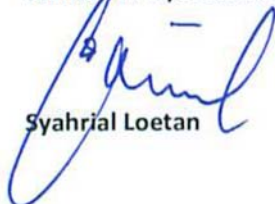
Selanjutnya Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) masing-masing sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP Tahun 2011 menjadi Rancangan Akhir RKP Tahun 2011. Selanjutnya untuk penyempurnaan Rancangan Akhir RKP Tahun 2011 tersebut, diselenggarakan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) 2010 dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2011. Musrenbangnas 2010 dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi Renja-K/L dan Usulan Pendanaan Perangkat Daerah (UP-PD) Provinsi dalam mengupayakan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2011.

Selanjutnya, guna mendukung kelancaran pelaksanaan Musrenbangnas Tahun 2010 ini, kami menyiapkan Panduan yang memuat kerangka acuan, agenda kegiatan, dan informasi umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Musrenbangnas. Panduan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peserta, sehingga pelaksanaan Musrenbangnas Tahun 2010 dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Demikian, atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti Musrenbangnas RKP 2011.

Jakarta, April 2010

Sesmen PPN/Sestama Bappenas



Syahrrial Loetan

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Kerangka Acuan Musrenbangnas Tahun 2010 Dalam Rangka Penyusunan RKP Tahun 2011	3-8
Mekanisme Sidang Kelompok Musrenbangnas RKP 2011	9
Pembagian Sidang Kelompok Musrenbangnas Tahun 2010, Berdasarkan Pembagian Kelompok Bidang dan Kelompok Wilayah	10
Jadual Pembukaan dan Sidang Pleno Musrenbangnas Tahun 2010	11
Jadual Sidang Kelompok Musrenbangnas Tahun 2010	12-14
Pemetaan Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014 dan RKP 2011 dalam Musrenbangnas Rancangan RKP 2011	15
Mekanisme Sidang kelompok, Pembahasan Teknis Musrenbangnas Tahun 2010, Distribusi Waktu Pembahasan Sidang Kelompok Musrenbangnas Tahun 2010	16
Peserta Sidang Kelompok Pembahasan Teknis Musrenbangnas Tahun 2010, Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	17
Peserta Sidang Kelompok Pembahasan Teknis Musrenbangnas Tahun 2010, Sektoral Bappenas	18
Alur Proses Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2011	19
Konstelasi Keterkaitan RKP Tahun 2011 dengan Buku I, Buku II dan Buku III RPJMN 2010-2014	20
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah dalam Penyusunan RKP 2011	21
Skema Matrik Persandingan Sinergi Pusat-Daerah	22
Contact Person; Tempat penyelenggaraan; Konfirmasi, Materi , dan Registrasi Peserta; Pakaian	23
Daftar Penghubung Provinsi	24-25
Info Singkat Musrenbangnas RKP 2011	26-27
Denah Lokasi dan Ruang Musrenbangnas RKP 2011	28-34

KERANGKA ACUAN MUSRENBANG NASIONAL TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP TAHUN 2011

1. LATAR BELAKANG

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN/RPJMD).

Selain itu, setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bahan masukan untuk finalisasi RKP, dan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan bahan bagi penyempurnaan RKPD. Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan Rancangan Awal RPJMN yang memuat antara lain prioritas pembangunan nasional; rancangan kerangka ekonomi makro dan pendanaan; indikasi program Kementerian/Lembaga, program lintas Kementerian/Lembaga dan program lintas wilayah; serta kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011 merupakan pedoman bagi penyusunan APBN 2011 yang akan ditetapkan secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. RKP mempunyai fungsi pokok sebagai : (1) Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menjabarkan seluruh kebijakan publik, (2) Pedoman dalam penyusunan APBN sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun, dan (3) Jaminan kepastian kebijakan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011 yang sedang disusun ini adalah **“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”**. Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional di tahun 2011, yang meliputi: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping itu, upaya pencapaian visi nasional juga akan didukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang: politik, hukum dan keamanan (polhukam), perekonomian, serta kesejahteraan rakyat. Prioritas pembangunan tersebut ditetapkan atas dasar tantangan pembangunan nasional saat ini dan dengan memperhatikan program dan kegiatan pokok yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang bersifat realistis, penting dan mendesak untuk dilaksanakan serta memiliki dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, prioritas pembangunan tersebut merupakan rencana aksi bagi strategi pencapaian sasaran pembangunan nasional pada RPJM Nasional 2010-2014.

APBN yang berpedoman kepada RKP harus dijaga konsistensinya sehingga 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional di tahun 2011, yang telah ditetapkan tersebut benar-benar tercermin dalam alokasi anggaran di setiap Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Alokasi tersebut kemudian tercermin dalam program-program dan kegiatannya. Hal ini sangat penting dilaksanakan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pengeluaran mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia dalam APBN.

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Awal RKP tahun 2011 tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti oleh semua Kementerian/Lembaga sebagai rujukan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L). Rancangan Awal RKP tahun 2011 juga disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah sebagai acuan dalam penyusunan Usulan Pendanaan Perangkat Daerah (UP-PD) yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan RAPBN tahun 2011.

Sehubungan dengan itu, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam perencanaan pembangunan tahun 2011 perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah tingkat Nasional (Musrenbangnas) tahun 2010 yang akan membahas dan menyempurnakan Rancangan Awal RKP dan Renja-K/L tahun 2011 untuk difinalisasi lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang merupakan mata rantai dalam proses penyusunan APBN tahun 2011.

2. TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan Musrenbangnas Tahun 2010 dalam rangka Penyusunan RKP Tahun 2011 adalah:

1. Menyempurnakan Rancangan Awal RKP 2011 menjadi rancangan akhir RKP 2011 dengan mengacu naskah RPJM Nasional 2010-2014 yang mulai diimplementasikan pada tahun 2010;
2. Melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2011 menjadi rancangan akhir Renja K/L 2011 dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan RKP 2011 serta prioritas dan aspirasi daerah sesuai kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi yang disampaikan dalam Usulan Pendanaan-Pemerintah Daerah (UP-PD).
3. Melakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh K/L dan Pemdand yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rancangan RKP 2011.
4. Memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah baik melalui kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan) dan kerangka anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi (D) dan tugas pembantuan (TP) serta dana perimbangan agar terwujud penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Mengembangkan dan memperkuat proses partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan RKP 2011.
6. Mengembangkan dan memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan (*safe guarding*) terhadap pelaksanaan RKP 2011.

3. TEMA

Tema Musrenbangnas Tahun 2010 disesuaikan dengan tema RKP 2011, yaitu: **“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”**

4. MASUKAN

Masukan bagi pelaksanaan Musrenbangnas RKP 2010 antara lain adalah:

1. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0181/M-PPN/04/2010 dan SE-120/MK/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Kementerian/Lembaga Tahun 2011.
2. Rancangan Interim Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 yang telah disiapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan memperhatikan hasil Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) I RKP 2011.

3. Rancangan Renja K/L tahun 2011 yang disusun dengan rinci sampai tingkat provinsi (dekonsentrasi/ TP) memperhatikan hasil Rakorbangpus dan Rancangan interim RKP 2011 (sesuai format musrenbangprov).
4. Renstra K/L 2010-2014 yang disusun oleh masing-masing kementerian/lembaga dengan memperhatikan hasil Rakorpus I RKP 2011 dan hasil pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) antara Kementerian Negara PPN/Bappenas, Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga, serta telah memperhatikan RPJMN 2010-2014.
5. Masukan dari Pemerintah Daerah terhadap rancangan RKP 2011 yang disampaikan pada Rakorpus I RKP 2011, sesuai dengan aspirasi strategis dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah nasional di daerah.

5. KELUARAN

Keluaran yang akan dihasilkan melalui pelaksanaan Musrenbangnas Tahun 2010 antara lain adalah:

1. Masukan dari K/L dan Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan Rancangan RKP 2011 dan Rancangan Renja K/L 2011.
2. Masukan dari Pemerintah Daerah berupa aspirasi strategis daerah, untuk perbaikan rancangan interim Renja K/L 2011 menjadi rancangan akhir Renja K/L 2011, serta program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
3. Kesepakatan yang diperoleh dalam Musrenbangnas 2010, akan ditindaklanjuti melalui forum Rakorpus II Pasca Musrenbangnas untuk mempertajam sasaran bidang dan wilayah dalam rancangan akhir RKP 2011 sebelum ditetapkan dalam Perpres tentang RKP 2011.
4. Kesepahaman tentang koordinasi, sinergi, pengendalian dan pengawasan (*safeguarding*) terhadap pelaksanaan RKP 2011, serta penguatan sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan.

6. MEKANISME PENYELENGGARAAN

Kegiatan Musrenbangnas Tahun 2010 meliputi sidang pleno dan sidang kelompok.

1. Sidang Pleno meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Sidang Pleno I:

1. Laporan Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Presiden tentang penyelenggaraan Musrenbangnas Tahun 2010 dalam rangka Penyusunan RKP 2011.
2. Pengarahan dan Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2010 dalam rangka Penyusunan RKP 2011 oleh Presiden RI.

b) Sidang Pleno II:

1. Paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Penyempurnaan Rancangan RKP 2011.
2. Paparan para Menteri Koordinator tentang Koordinasi pencapaian sasaran prioritas nasional untuk masing-masing bidang koordinasi.

3. Paparan Menteri Keuangan dengan topik : Pemanjapan Penganggaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Berbasis Kinerja Dalam Kerangka Peletakan Fondasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan dan Mendukung Sinergi Pusat-Daerah.
4. Paparan Menteri Dalam Negeri dengan topik : Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Sinergi Pusat Daerah Untuk Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Dan Berdaya Saing.

c) Sidang Pleno III:

Pengarahan Wakil Presiden dilanjutkan Dialog Pusat-Daerah dengan para Gubernur/Bupati/Walikota tentang pencapaian prioritas pembangunan tahun 2011 secara sinergis antara Pusat dan Daerah dalam perencanaan pembangunan.

d) Sidang Pleno Penutupan:

Kesimpulan dan kesepakatan hasil Musrenbangnas Tahun 2010 dan Sambutan Penutupan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

2. Sidang kelompok dilakukan dengan maksud dan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Pembahasan usulan prioritas Program dan kegiatan Nasional dan mengakomodir aspirasi Pemerintah Daerah untuk ditampung dalam perbaikan rancangan RKP 2011 dan rancangan Renja K/L 2011.
- (2) **Sidang Kelompok dibagi menurut 11 Prioritas Nasional 2010-2014:**
 - a. **Kelompok I:** Pendidikan (Prioritas 2); Kesehatan (Prioritas 3); Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi (Prioritas 11); serta Prioritas lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - b. **Kelompok II:** Ketahanan Pangan (Prioritas 5); Iklim Investasi dan Iklim Usaha (Prioritas 7); Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana (Prioritas 9); serta Prioritas lainnya Bidang Perekonomian.
 - c. **Kelompok III:** Infrastruktur (Prioritas 6); Energi (Prioritas 8).
 - d. **Kelompok IV:** Kemiskinan (Prioritas 4); Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik (Prioritas 10).
 - e. **Kelompok V:** Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan Prioritas lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- (3) **Pembagian Peserta Daerah menurut Kelompok Wilayah Pembangunan sesuai dengan Buku III RPJMN 2010-2014:**
 - a. **Wilayah Sumatera-A:** Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau;
 - b. **Wilayah Sumatera-B:** Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel, Lampung;
 - c. **Wilayah Jawa-Bali:** Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali;
 - d. **Wilayah Kalimantan:** Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel;
 - e. **Wilayah Sulawesi:** Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra;
 - f. **Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua:** NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

7. PESERTA DAN AGENDA ACARA

Peserta Musrenbangnas Tahun 2010 terdiri dari:

- a) Sidang Pleno I (Pengarahan dan Pembukaan) diikuti oleh:
 1. Peserta pusat: seluruh Sekjen/Sesmen/Sestama dari seluruh Kementerian/Lembaga, Perwakilan dunia usaha, akademisi, LSM
 2. Peserta daerah: seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, dan para Kepala Bappeda Provinsi, Kabupaten dan Kota
- b) Sidang Pleno II (Paparan oleh para Menteri) diikuti oleh:
 1. Peserta pusat: seluruh Sekjen/Sesmen/Sestama, Karo Perencanaan, Sesditjen dari seluruh Kementerian/Lembaga, dan
 2. Peserta daerah: seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, dan para Kepala Bappeda Provinsi, Kabupaten dan Kota
- c) Sidang Pleno III (Pengarahan Wakil Presiden dan Dialog Pusat-Daerah) diikuti oleh:
 1. Peserta pusat: seluruh Sekjen/Sesmen/Sestama, Karo Perencanaan, Sesditjen dari seluruh Kementerian/Lembaga, dan
 2. Peserta daerah: seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, beserta para Kepala Bappeda Provinsi, Kabupaten dan Kota
- d) Sidang Kelompok diikuti oleh:
 1. Peserta pusat: seluruh Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan dan Sesditjen setiap kementerian/lembaga, perwakilan dunia usaha, akademisi, lembaga profesi, LSM, kepala Bappeda beberapa kab/kota atas rekomendasi Bappeda Provinsi.
 2. Peserta daerah: seluruh Kepala Bappeda Provinsi, perwakilan dunia usaha, akademisi, lembaga profesi, LSM.

8. PEMBIAYAAN

Kegiatan Musrenbangnas Tahun 2010 diselenggarakan dengan sumber pendanaan APBN 2010 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

9. WAKTU DAN TEMPAT

Musrenbangnas Tahun 2010 diselenggarakan selama 4 (empat) hari, yaitu mulai hari Rabu, 28 April 2010 bertempat di Komplek Bidakara (Ruang Birawa), Jalan Gatot Subroto; dan hari Kamis s/d Sabtu, 29 April – 1 Mei 2010, bertempat di Balai Kartini (Ruang Raflesia I, Raflesia II, Mawar I, Mawar II dan Anggrek), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

10. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Penanggung jawab penyelenggaraan Musrenbangnas Tahun 2010 adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Pelaksana teknis kegiatan adalah Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas dan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

MEKANISME SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS RKP 2011

1 Pembahasan sinergi pusat dan daerah terhadap Prioritas Nasional untuk ditampung dalam perbaikan rancangan RKP 2011 dan penyempurnaan rancangan Renja K/L 2011

2 Sidang Kelompok dibagi menurut 11 Prioritas Nasional :

A Kelompok I : Pendidikan (P2); Kesehatan (P3); Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi (P11); serta Prioritas lainnya dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat.

B Kelompok II : Ketahanan Pangan (P5); Iklim Investasi dan Iklim Usaha (P7); Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana (P9); serta Prioritas lainnya dalam Bidang Perekonomian.

C Kelompok III : Infrastruktur (P6); Energi (P8).

D Kelompok IV : Kemiskinan (P4); Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik (P10).

E Kelompok V* : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (P1) dan Prioritas lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

3 Pembagian Peserta Daerah menurut Kelompok Wilayah Pembangunan

A Wilayah Sumatera-A (5 provinsi): Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri

B Wilayah Sumatera-B (5 provinsi): Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel, Lampung

C Wilayah Jawa-Bali (7 provinsi): Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali

D Wilayah Kalimantan (4 Provinsi): Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel

E Wilayah Sulawesi (6 provinsi): Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra

F Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (6 provinsi): NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

Keterangan:

*) Khusus untuk Kelompok V, sidang tidak dibagi pada tiap sesi sebagaimana kelompok I-IV, namun hanya satu kali sesi secara pleno pada Hari Kamis tanggal 29 April 2010 jam 19.00-22.00.

JADUAL PEMBUKAAN DAN SIDANG PLENO MUSRENBANGNAS TAHUN 2010

WAKTU: RABU, 28 APRIL 2010

LOKASI: RUANG BIRAWA, BIDADAKARA, JAKARTA

HARI I : SIDANG PLENO, Rabu, 28 April 2010

WAKTU (WIB)	ACARA	PESERTA		KETERANGAN
		Pusat	Daerah	
08.00-09.30	Registrasi	Para Menteri, Kepala Lembaga, Panglima TNI, Kapolri, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MA, Jaksa Agung, Ketua Komisi ² , Sekjen/Sesmen/Sestama, Perwakilan LSM dan dunia usaha	Gubernur, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota	Tempat: Ruang Birawa, Komplek Bidakara, Jakarta Selatan
09.30-09.55	Para Undangan dan Peserta telah hadir di tempat acara			
09.55-10.00	Presiden RI tiba di Ruang Birawa, Komplek Bidakara			
10.00-10.05	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya			
10.05-10.15	Laporan Menteri PPN/Kepala Bappenas			
10.15-10.20	Penyerahan secara simbolis Buku Evaluasi RPJMN 2005-2009 dan Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah kepada perwakilan Gubernur, Bupati, dan Walikota			
10.20-11.05	Pengarahan dan Pembukaan oleh Presiden RI			
11.05-11.10	Pembacaan Doa			
11.10	Presiden RI meninggalkan tempat acara			
11.10-11.15	J e d a			
11.15-13.00	Pleno Penjelasan Rancangan RKP 2011 1. MPPN/Kepala Bappenas 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Dalam Negeri	Sekjen/ Sesmen/ Sestama, Perwakilan LSM dan dunia usaha	Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota	Moderator: Wamen PPN/ Waka Bappenas
13.00-14.30	ISHOMA			
14.30-16.30	Dialog Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dalam RKP 2011 antara Wapres dengan Kepala Daerah didampingi Para Menteri Koordinator	Menteri/Kepala Lembaga, Sekjen/ Sesmen/ Sestama, LSM, dunia usaha	Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota	Moderator: Menteri PPN/ Kepala Bappenas

**PEMBAGIAN SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010,
BERDASARKAN PEMBAGIAN KELOMPOK BIDANG DAN KELOMPOK WILAYAH
WAKTU: KAMIS-SABTU, 29 APRIL-1 MEI 2010
LOKASI: BALAI KARTINI, JAKARTA**

Kelompok Bidang	Kelompok 1 (P2:Pendidikan; P3:Kesehatan; P11: Kebudayaan, Kreativitas & Inovasi Teknologi; dan Prioritas Bidang Kesra lainnya) RUANG : MAWAR II	Kelompok 2 (P5:Ketahanan Pangan; P7:Iklim Investasi & Iklim Usaha; P9:Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana; dan Prioritas Bidang Perekonomian lainnya) RUANG : RAFLESIA II	Kelompok 3 (P6:Infrastruktur; P8: Energi) RUANG : RAFLESIA I	Kelompok 4 (P4: Penanggulangan Kemiskinan; P10:Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pascakonflik) RUANG : MAWAR I
Waktu Sidang				
Hari/Tanggal/Sesi				
Kamis, 29 April, Sesi 1 (09.00-12.30)	Wilayah Sumatera-A	Wilayah Sumatera-B	Wilayah Jawa-Bali	Wilayah Kalimantan
Kamis, 29 April, Sesi 2 (14.00-17.30)	Wilayah Sulawesi	Wilayah Nusa Tenggara-Maluku- Papua	Wilayah Sumatera-A	Wilayah Sumatera-B
Kamis, 29 April, (19.00-22.00)	Sesi Pleno Kelompok 5: Penjelasan dan Dialog Prioritas 1 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) dan Prioritas lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dengan peserta seluruh Kepala Bappeda Provinsi dan K/L terkait. (Lokasi: Ruang RAFLESIA-II)			
Jumat, 30 April, Sesi 1 (08.00-11.30)	Wilayah Jawa-Bali	Wilayah Kalimantan	Wilayah Sulawesi	Wilayah Nusa Tenggara-Maluku- Papua
Jumat, 30 April, Sesi 2 (14.00-17.30)	Wilayah Sumatera-B	Wilayah Jawa-Bali	Wilayah Kalimantan	Wilayah Sulawesi
Sabtu, 1 Mei, Sesi 1 (09.00-12.30)	Wilayah Nusa Tenggara- Maluku-Papua	Wilayah Sumatera-A	Wilayah Sumatera-B	Wilayah Jawa-Bali
Sabtu, 1 Mei, Sesi 2 (14.00-17.30)	Wilayah Kalimantan	Wilayah Sulawesi	Wilayah Nusa Tenggara-Maluku- Papua	Wilayah Sumatera-A
Sabtu, 1 Mei, (19.00-21.00)	Penutupan Musrenbangnas 2010: Peserta: seluruh Sekjen/Sesmen/Sestama K/L dan Kepala Bappeda Provinsi (Lokasi: Ruang Lobi Utama, Lt 1) Agenda: (1) Makan malam; (2) Kesepakatan untuk pelaksanaan RKP/ RKPd 2011; (3) Sambutan Penutup oleh MPPN/Ka.Bappenas			

**JADUAL SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010,
WAKTU: KAMIS, 29 APRIL 2010
LOKASI: BALAI KARTINI, JAKARTA**

HARI II : SIDANG KELOMPOK, Kamis, 29 April 2010

Waktu (WIB)	Kelompok 1 (P2:Pendidikan; P3:Kesehatan; P11: Kebudayaan, Kreativitas & Inovasi Teknologi; dan Prioritas Bidang Kesra lainnya) RUANG : MAWAR II	Kelompok 2 (P5:Ketahanan Pangan; P7:Iklim Investasi & Iklim Usaha; P9:Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana; dan Prioritas Bidang Perekonomian lainnya) RUANG : RAFLESIA II	Kelompok 3 (P6:Infrastruktur; P8: Energi) RUANG : RAFLESIA I	Kelompok 4 (P4: Penanggulangan Kemiskinan; P10:Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pascakonflik) RUANG : MAWAR I
- 08:00-09:00	REGISTRASI			
	Moderator : Staf Ahli Bidang Revitalisasi Perdesaan, Pertanian, dan Agroindustri Penyaji : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Moderator : Staf Ahli Bidang Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Penyaji : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Deputi Bidang Ekonomi	Moderator : Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman Penyaji : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	Moderator : Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Penyaji : Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah/ Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
- 09:00-12:30 (Sesi I)	Peserta Daerah : Wilayah Sumatera-A (5 provinsi): Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri	Peserta Daerah : Wilayah Sumatera –B (5 provinsi): Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel, Lampung	Peserta Daerah : Wilayah Jawa-Bali (7 provinsi): Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali	Peserta Daerah : Wilayah Kalimantan (4 Provinsi): Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel
- 12.30-14.00	J e d a			
- 14:00-17:30 (Sesi II)	Peserta Daerah : Wilayah Sulawesi (6 provinsi): Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra	Peserta Daerah : Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua (6provinsi): NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara, Papua dan Papua Barat	Peserta Daerah : Wilayah Sumatera-A (5 provinsi): ACEH, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri	Peserta Daerah : Wilayah Sumatera –B (5 provinsi): Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel, Lampung
- 17.30-19.00	J e d a			
- 19.00-22.00	Sesi Pleno Kelompok 5: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (Prioritas 1), dan Prioritas lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Moderator : Inspektur Utama, Penyaji : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Peserta Daerah: Seluruh Kepala Bappeda Provinsi; Peserta Pusat : K/L terkait; Ruang: RAFLESIA-II			

**JADUAL SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010,
WAKTU: JUMAT, 30 APRIL 2010
LOKASI: BALAI KARTINI, JAKARTA**

HARI III : SIDANG KELOMPOK, Jumat, 30 April 2010				
Waktu (WIB)	Kelompok 1 (P2:Pendidikan; P3:Kesehatan; P11: Kebudayaan, Kreativitas & Inovasi Teknologi; dan Prioritas Bidang Kesra lainnya) RUANG : MAWAR II	Kelompok 2 (P5:Ketahanan Pangan; P7:Iklim Investasi & Iklim Usaha; P9:Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana; dan Prioritas Bidang Perekonomian lainnya) RUANG : RAFLESIA II	Kelompok 3 (P6:Infrastruktur; P8: Energi) RUANG : RAFLESIA I	Kelompok 4 (P4: Penanggulangan Kemiskinan; P10:Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pascakonflik) RUANG : MAWAR I
- 07:30-08:00	REGISTRASI			
	Moderator : Staf Ahli Bidang Revitalisasi Perdesaan, Pertanian, dan Agroindustri Penyaji : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Moderator : Staf Ahli Bidang Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Penyaji : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Deputi Bidang Ekonomi	Moderator : Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman Penyaji : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	Moderator : Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Penyaji : Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah/ Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
- 08:00-11:30 (Sesi I)	Peserta Daerah : Wilayah Jawa-Bali (7 provinsi): Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali	Peserta Daerah : Wilayah Kalimantan (4 Provinsi): Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel	Peserta Daerah : Wilayah Sulawesi (6 provinsi): Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra	Peserta Daerah : Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua (6 provinsi): NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
- 11.30-14.00	J e d a			
- 14:00-17:30 (Sesi II)	Peserta Daerah : Wilayah Sumatera – B (5 provinsi): Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel, Lampung	Peserta Daerah : Wilayah Jawa-Bali (7 provinsi): Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali	Peserta Daerah : Wilayah Kalimantan (4 Provinsi): Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel	Peserta Daerah : Wilayah Sulawesi (6 provinsi): Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra

JADUAL SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010,
WAKTU: SABTU, 1 MEI 2010
LOKASI: BALAI KARTINI, JAKARTA

HARI IV : SIDANG KELOMPOK, Sabtu, 1 Mei 2010				
Waktu (WIB)	Kelompok 1 (P2:Pendidikan; P3:Kesehatan; P11: Kebudayaan, Kreativitas & Inovasi Teknologi; dan Prioritas Bidang Kesra lainnya) RUANG : MAWAR II	Kelompok 2 (P5:Ketahanan Pangan; P7:Iklim Investasi & Iklim Usaha; P9:Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana; dan Prioritas Bidang Perekonomian lainnya) RUANG : RAFLESIA II	Kelompok 3 (P6:Infrastruktur; P8: Energi) RUANG : RAFLESIA I	Kelompok 4 (P4: Penanggulangan Kemiskinan; P10:Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pascakonflik) RUANG : MAWAR I
- 08:00-09:00	REGISTRASI			
	Moderator : Staf Ahli Bidang Revitalisasi Perdesaan, Pertanian, dan Agroindustri Penyaji : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Moderator : Staf Ahli Bidang Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Penyaji : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Deputi Bidang Ekonomi	Moderator : Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman Penyaji : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	Moderator : Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Penyaji : Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah/ Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
- 09:00-12:30 (Sesi I)	Peserta Daerah : Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua	Peserta Daerah : Wilayah Sumatera-A (5 provinsi): ACEH, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri	Peserta Daerah : Wilayah Sumatera –B (5 provinsi): Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel, Lampung	Peserta Daerah : Wilayah Jawa-Bali (7 provinsi): Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali
- 12.30-14.00	J e d a			
- 14:00-17:30 (Sesi II)	Peserta Daerah : Wilayah Kalimantan (4 Provinsi): Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel	Peserta Daerah : Wilayah Sulawesi (6 provinsi): Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulse, Sultra	Peserta Daerah : Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua (6 provinsi): NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara, Papua dan Papua Barat	Peserta Daerah : Wilayah Sumatera-A (5 provinsi): ACEH, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri
- 17.30-19.00	J e d a			
- 19.00-21.00	Penutupan Musrenbangnas di Ruang LOBI UTAMA, Lantai 1, Balai Kartini Peserta: Sekjen/ Sesmen/Sestama Kementerian/Lembaga; seluruh Kepala Bappeda Provinsi Agenda: (1) Makan malam (19.00-20.00); (2) Kesepakatan untuk pelaksanaan RKP/ RKPd 2011 (20.00-20-30); (3) Sambutan penutup oleh Men PPN (20.30-21.00)			

**PEMETAAN PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010-2014 DAN RKP 2011
DALAM MUSRENBANGNAS RANCANGAN RKP 2011**

No	Prioritas Nasional RKP 2011	Bidang Pembangunan RKP 2011 (Buku II)	Kelompok Bidang
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Hukum	Kelompok 5 (Pleno)
2	Pendidikan	Sosbud	Kelompok 1
3	Kesehatan	Sosbud	Kelompok 1
4	Penanggulangan Kemiskinan	Sosbud	Kelompok 4
5	Ketahanan Pangan	Ekonomi	Kelompok 2
6	Infrastruktur	Sarana Prasarana	Kelompok 3
7	Iklm Investasi dan Iklm Usaha	Ekonomi	Kelompok 2
8	Energi	Ekonomi	Kelompok 3
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	SDA dan LH	Kelompok 2
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik	Wilayah dan Tata Ruang	Kelompok 4
11	Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi	IPTEK	Kelompok 1
12	Prioritas lainnya Bidang Perekonomian		Kelompok 2
13	Prioritas lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat		Kelompok 1
14	Prioritas lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Politik, Hankam	Kelompok 5 (Pleno)

MEKANISME SIDANG KELOMPOK
PEMBAHASAN TEKNIS MUSRENBANGNAS TAHUN 2010,
DISTRIBUSI WAKTU PEMBAHASAN SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010

No	Alokasi Waktu (menit)	Tahapan Kegiatan	Pembicara/Penanggungjawab
1.	0 – 15' (15')	Pengantar Sidang oleh Moderator: menjelaskan tata cara jalannya sidang, dan menyampaikan isu strategis masing-masing Provinsi yang terkait dengan prioritas nasional, serta rencana pembahasan dan pemilihan kegiatan yang dibahas dalam sidang	Moderator
2.	16' – 75' (60')	Paparan terkait prioritas bidang untuk seluruh provinsi dalam kelompok wilayah yang bersangkutan	Deputi Bappenas penanggungjawab bidang terkait dalam Buku II, didampingi oleh Direktur terkait
3.	76' – 150' (75')	Tanggapan/Masukkan dari Bappeda Provinsi (Alokasi 5 – 10' per-provinsi) fokus ke prioritas bidang terkait.	Kepala Bappeda Provinsi
4.	151' – 180' (30')	Respon Deputi Bappenas dan Karo K/L terhadap tanggapan/masukan Bappeda Provinsi.	Deputi Bappenas, Direktur Bappenas, dan Karo Perencanaan K/L terkait
6.	181' – 195' (15')	Perumusan Kesepakatan Sidang Kelompok	Moderator dan Deputi Bappenas terkait
7.	196' – 205' (10')	Kesimpulan dan Kesepakatan Sidang Kelompok	Moderator dan Kepala Bappeda Provinsi dan Deputi Bappenas terkait
8.	205' – 210' (5')	Penutupan oleh Moderator	Moderator

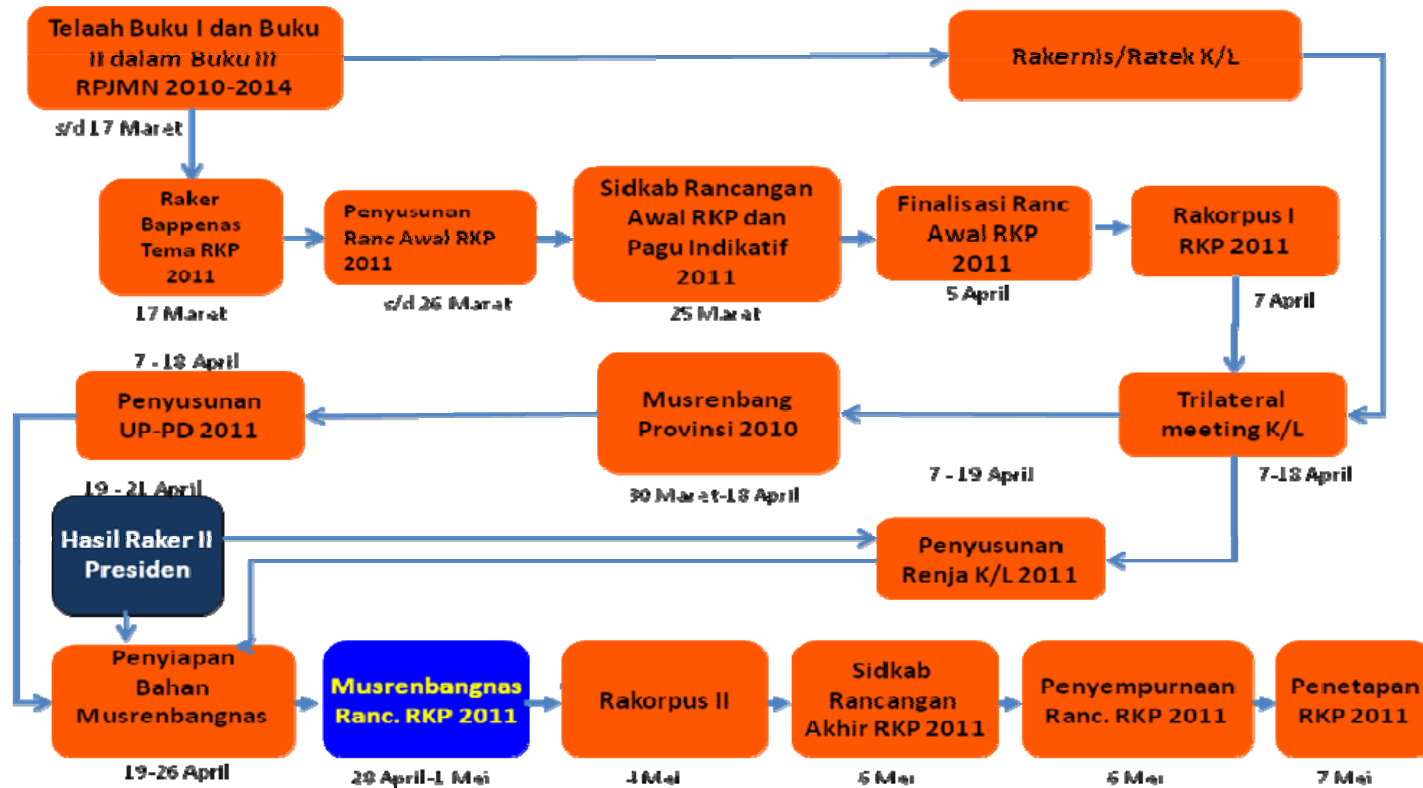
PESERTA SIDANG KELOMPOK PEMBAHASAN TEKNIS MUSRENBANGNAS TAHUN 2010, KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH

Kelompok 1 (P2:Pendidikan; P3:Kesehatan; P11: Kebudayaan, Kreativitas & Inovasi Teknologi; Prioritas Kesra) RUANG : MAWAR II	Kelompok 2 (P5:Ketahanan Pangan; P7:Iklim Investasi & Iklim Usaha; P9:Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana; Prioritas Ekonomi) RUANG : RAFLESIA II	Kelompok 3 (P6:Infrastruktur; P8: Energi) RUANG : RAFLESIA I	Kelompok 4 (P4: Penanggulangan Kemiskinan; P10:Daerah Tertinggal, Terdepan & Pascakonflik) RUANG : MAWAR I	Kelompok 5 (Pleno) (Hari Kamis, 19.00-22.00) (P1:Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Prioritas Polhukam) RUANG : RAFLESIA II
Pemerintah Daerah: - Kepala Bappeda Provinsi - Kepala Bidang Bappeda Prov.	Pemerintah Daerah: - Kepala Bappeda Provinsi - Kepala Bidang Bappeda Prov.	Pemerintah Daerah: - Kepala Bappeda Provinsi - Kepala Bidang Bappeda Prov.	Pemerintah Daerah: - Kepala Bappeda Provinsi - Kepala Bidang Bappeda Prov.	Pemerintah Daerah: - Kepala Bappeda Provinsi - Kepala Bidang Bappeda Prov.
Kementerian/ Lembaga: Sekjen/ Sekmen/ Sestama/ Karo Perencanaan, Karo Keuangan, Sesditjen 1. Kementerian Pendidikan Nasional 2. Kementerian Agama 3. Kementerian Komunikasi dan Informasi 4. Kementerian Kesehatan 5. Kementerian Pekerjaan Umum 6. Kemenko Bidang Kesra 7. BKKBN 8. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 9. Perpustakaan Nasional 10. Kementerian Riset dan Teknologi 11. LIPI 12. BPPT 13. BKKBN 14. Kementerian Pemuda dan Olahraga 15. Kementerian Sosial 16. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)	Kementerian/ Lembaga: Sekjen/ Sekmen/ Sestama/ Karo Perencanaan, Karo Keuangan, Sesditjen 1. Kemenko Bidang Perekonomian 2. Kem.Pertanian 3. Kem.Pekerjaan Umum 4. Kem.Komunikasi dan Informatika 5. Kem.Perhubungan 6. Kem.Perindustrian 7. Kem.Perdagangan 8. Kem.Kuangan 9. Kem.Riset dan Teknologi 10. Kem.Lingkungan Hidup 11. Kem.Hukum dan HAM 12. Kemendagri 13. Badan Koordinasi Penanaman Modal 14. Badan Pertanahan Nasional 15. BPPT 16. BATAN 17. BASARNAS 18. LIPI 19. Kem.Kehutanan 20. Kem. Kesehatan 21. BNPB 22. BMKG 23. Kem.Kelautan dan Perikanan 24. Bakorsurtanal 25. Kem. Tenaga Kerja dan Transmigrasi 26. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) 27. BNP2TKI 28. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	Kementerian/ Lembaga: Sekjen/ Sekmen/ Sestama/ Karo Perencanaan, Karo Keuangan, Sesditjen 1. Badan Petanahan Nasional 2. Kemenko Bidang Perekonomian 3. Kem.Pekerjaan Umum 4. Bakosurtanal 5. Kem.Perhubungan 6. Kem.BUMN 7. Kem.Riset dan Teknologi 8. Kem.Perumahan Rakyat 9. Kem.Komunikasi dan Informatika 10. Kem.ESDM 11. LIPI 12. BATAN 13. BPPT 14. Kem.Pertanian 15. Kem.Perindustrian	Kementerian/ Lembaga: Sekjen/ Sekmen/ Sestama/ Karo Perencanaan, Karo Keuangan, Sesditjen 1. Kementerian Kesehatan 2. BKKBN 3. Kem.Pendidikan Nasional 4. Kementerian Agama 5. Kementerian Sosial 6. Kementerian PDT 7. Kemenko Bidang Kesra 8. Badan Pertanahan Nasional 9. Kem. Tenaga Kerja & Transmigrasi 10. Kem.Pekerjaan Umum 11. Kemendagri 12. Kem.Perhubungan 13. Kem.Kelautan dan Perikanan 14. Kem.Pertanian 15. Kem.Komunikasi & Informatika 16. Kem.Kebudayaan & Pariwisata 17. Kem.Kuangan 18. Kemenko Bidang Perekonomian 19. Bakosurtanal 20. Kementerian KUKM 21. Kemenko Polhukam 22. Kem.Riset dan Teknologi 23. BPPT 24. Kem. Pertahanan 25. Kem. Luar Negeri	Kementerian/ Lembaga: Sekjen/ Sekmen/ Sestama/ Karo Perencanaan, Karo Keuangan, Sesditjen 1. Kemenko Polhukam 2. Kem.PAN dan Refor-Birokrasi 3. Kem. Dalam Negeri 4. Kem. Keuangan 5. Kem. Luar Negeri 6. Kem. Kominfo 7. Kem.Sekretaris Negara 8. Kem.Hukum dan HAM 9. Kem.Pertahanan 10. TNI 11. Kepolisian RI 12. Kejaksaan Agung 13. MA 14. Komnas HAM 15. BKN 16. LAN 17. KPK 18. BPK 19. BPKP 20. BNN 21. ANRI 22. LKPP 23. Bakorkamla 24. Komnas Perempuan 25. Komisi Yudisial 26. Mahkamah Konstitusi 27. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 28. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

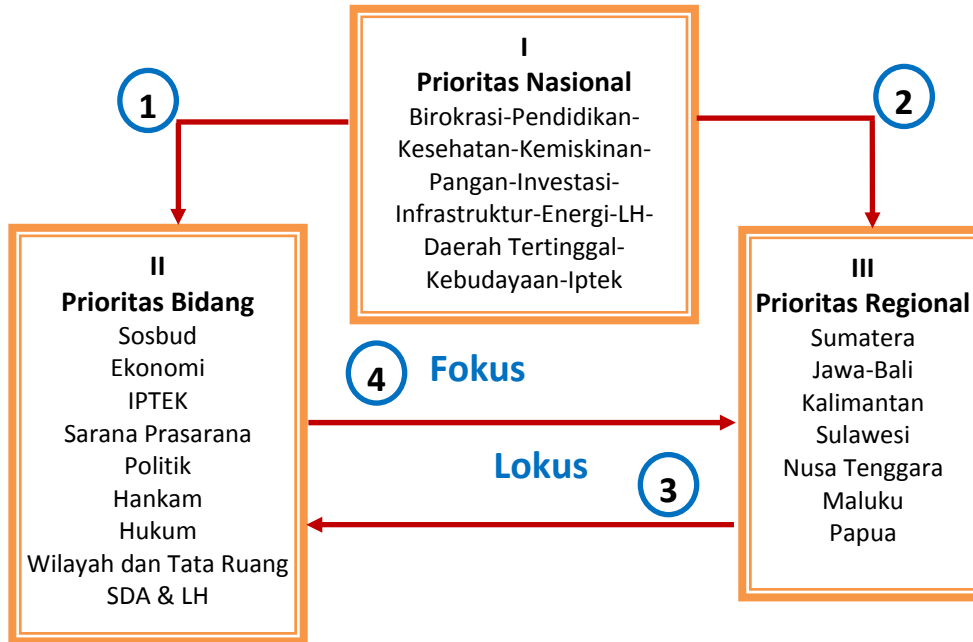
PESERTA SIDANG KELOMPOK PEMBAHASAN TEKNIS MUSRENBANGNAS TAHUN 2010, SEKTORAL BAPPENAS

Kelompok 1 (P2:Pendidikan; P3:Kesehatan; P11: Kebudayaan, Kreativitas & Inovasi Teknologi; dan Prioritas Bidang Kesra lainnya)	Kelompok 2 (P5:Ketahanan Pangan; P7:Iklim Investasi & Iklim Usaha; P9:Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana; dan Prioritas Bidang Perekonomian lainnya)	Kelompok 3 (P6:Infrastruktur; P8: Energi)	Kelompok 4 (P4: Penanggulangan Kemiskinan; P10:Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pascakonflik)	Kelompok 5 (Pleno) (Hari Kamis, 19.00-22.00) (P1:Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan Prioritas Bidang Polhukam lainnya)
RUANG : MAWAR II	RUANG : RAFLESIA II	RUANG : RAFLESIA I	RUANG : MAWAR I	RUANG : RAFLESIA II
Bappenas: 1. Direktorat Agama dan Pendidikan 2. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat 3. Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan 4. Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 5. Direktorat Industri, Iptek dan BUMN	Bappenas: 1. Direktorat Pangan dan Pertanian 2. Direktorat Kelautan dan Perikanan 3. DirektoratLingkungan Hidup 4. Direktorat Kehutanan 5. Direktorat Perencanaan Makro 6. Direktorat Keuangan Negara 7. Direktorat Jasa keuangan dan Analisis Moneter 8. Direktorat Perdagangan, Investasi dan KEI 9. Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja 10. Direktorat Industri, Iptek dan BUMN 11. Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah tertinggal 12. Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Bappenas: 1. Direktorat Permukiman dan Perumahan 2. Direktorat Sumber Daya Mineral dan Pertambangan 3. Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika 4. Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta 5. Direktorat Industri, Iptek dan BUMN 6. Direktorat Transportasi 7. Direktorat Pengairan dan Irigasi 8. Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta 9. Direktorat Industri, Iptek dan BUMN	Bappenas: 1. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan 2. Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal 3. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan 4. Direktorat Perkotaan dan Perdesaan 5. Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM 6. Direkora Perlindungan dan Kesejahteraan Rakyat	Bappenas: 1. Direktorat Hukum dan HAM 2. Direktorat Pertahanan dan Keamanan 3. Direktorat Politik dan Komunikasi 4. Direktorat Aparatur Negara 5. Direktorat Analisis Peraturan Perundang-undangan 6. Direktorat Otonomi Daerah

ALUR PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2011



KONSTELASI KETERKAITAN RKP TAHUN 2011 DENGAN BUKU I, BUKU II DAN BUKU III RPJMN 2010-2014



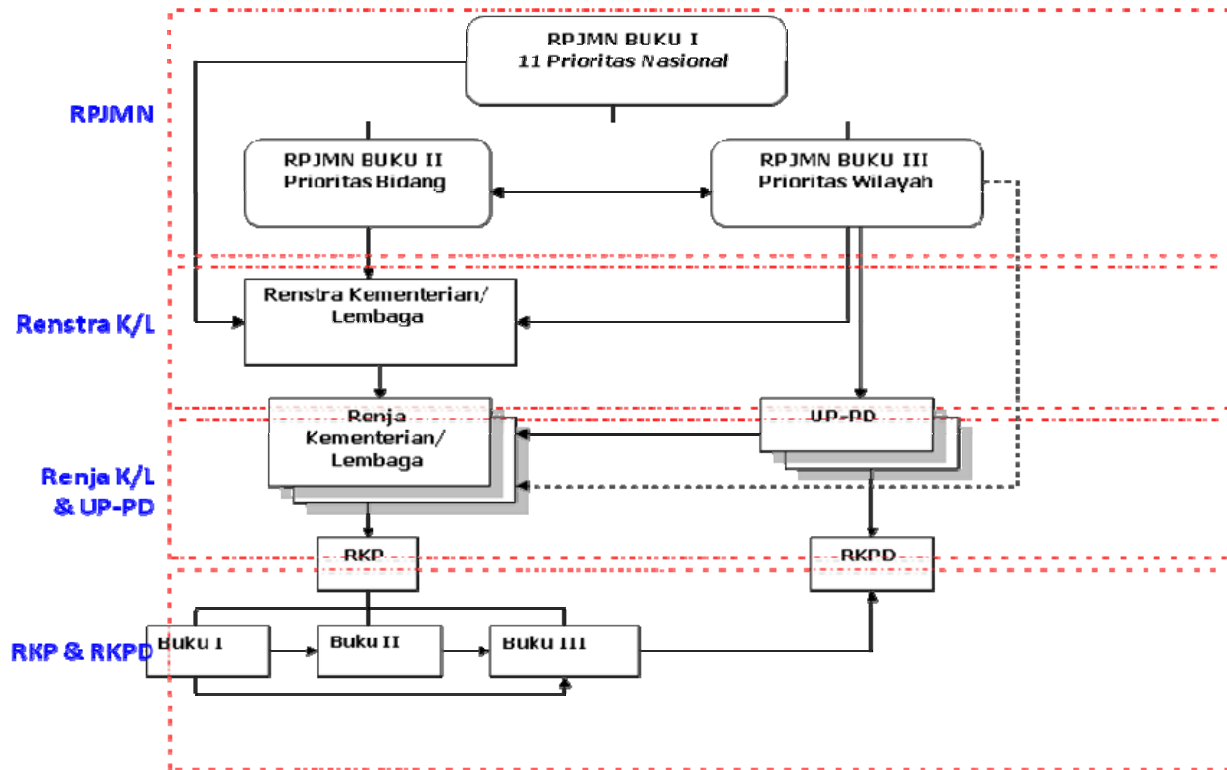
Tata Urut (Flow) Keterkaitan Buku I – II dan III

1. Buku I memuat Prioritas Nasional menjadi masukan didalam penjabaran arah kebijakan bidang dalam buku II
2. Buku I memberikan arah kebijakan regional dalam buku III
3. Buku III memuat kebutuhan dan permasalahan strategis masing-masing wilayah yang menjadi arahan bidang dalam mengisi kebutuhan wilayah (= Lokus)
4. Buku II memuat arah kebijakan dan prioritas kegiatan bidang yang akan mengisi kebutuhan wilayah (= Fokus)

Keterangan :

1. Sebagai Acuan Bidang/ Sektor
2. Sebagai Acuan Pengembangan Wilayah
3. Meginformasikan arah dan kebutuhan tiap wilayah
4. Meginformasikan kemampuan pencapaian pada wilayah

KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RKP 2011



SKEMA MATRIKS PERSANDINGAN SINERGI PUSAT-DAERAH

Format Akhir Buku III RKP 2011

Arah Kebijakan	Strategi Pengembangan	Prioritas Nasional	Fokus Prioritas	K/L	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi	Alokasi Dana

Format UP-PD Musrenbangprov

Arah Kebijakan	Strategi Pengembangan	Fokus Prioritas	Prioritas (Nasional /Pulau)	Program	K/L	Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah					
						Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Lokasi	Alokasi	D/TP

Format Pembahasan Musrenbangnas RKP 2011

Provinsi:
Pusat:

Kode	K/L/ Program/Kegiatan	UP-PD			Renja K/L			Catatan Kesepakatan			
		Indikator	Target	Alokasi	Indikator	Target	Alokasi	Sepakat	Tidak Sepakat	Dibahas Lanjut	Keterangan

*) Sidang kelompok ditujukan untuk membahas : (i) substansi kegiatan/ program, (ii) target (jml orang/ volume/ unit) dengan menarasikan antara aspirasi daerah dengan rencana K/L, serta sinergi pencapaian target antara APBN dengan APBD dim rangka mencapai target nasional, sehingga tidak sekedar membahas besarnya anggaran, dan tidak hanya membahas TP dan Dekon.

CONTACT PERSON

Berbagai informasi mengenai materi dan tata laksana penyelenggaraan Musrenbangnas RKP 2011, dapat menghubungi:

No	Nama	Telp/ HP	Email
1	Rohmad Supriyadi	0811-146-586	rohmad@bappenas.go.id
2	Uke M.Hussein	0813-1906-5688	umh@bappenas.go.id
3	Sumedi Andono Mulyo	0858-8059-6992	sumedi@bappenas.go.id
4	Awan Setiawan	0811-901-972	awans@bappenas.go.id
5	Diah Lenggogeni	0852-168-66807	diah.lenggogeni@bappenas.go.id
6	Budi Cahyono	0878-8230-2226	budi.cahyono@bappenas.go.id
7	Hari Dwi Korianto	0816-485-3249	haridk@bappenas.go.id
8	Erwin Dimas	0812-104-8761	dimas@bappenas.go.id
9	Anang Budi Gunawan	0856-2911-636	anang.gunawan@bappenas.go.id
10	Rayi Paramita	0852-2039-6732	rayi.paramita@bappenas.go.id
11	Ika Retna W	0812-1070-8083	ika.wulandary@bappenas.go.id

TEMPAT PENYELENGGARAAN

Tempat untuk pelaksanaan Musrenbangnas RKP 2011 adalah di Komplek Bidakara dan Balai Kartini, Jakarta Selatan.

KONFIRMASI, MATERI, DAN REGISTRASI PESERTA

Konfirmasi kehadiran, pembagian tanda pengenal dan materi dilaksanakan pada Selasa, 27 April 2010, mulai jam 11:00 s.d 16.00 WIB

PAKAIAN

- Hari I, untuk pembukaan, menggunakan PDH (Pakaian Dinas Harian), sementara untuk wanita bebas rapi/menyesuaikan.
- Hari II, III, dan IV selama persidangan menggunakan PDH (Pakaian Dinas Harian), sementara untuk wanita bebas rapi/menyesuaian.

DAFTAR PENGHUBUNG PROVINSI (1)

NO	PROVINSI	PETUGAS PENGHUBUNG PROVINSI			
		NAMA	HP	Alamat Email	Unit Kerja
A	SUMATERA A				
1	Aceh	Heriyadi	08158837743	heriyadi74@yahoo.co.id	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral
2	Sumatera Utara	Rudi Alfian	08567293754	rudialfian@bappenas.go.id	Direktorat Pengembangan Wilayah
3	Sumatera Barat	Hindun Barokah	08128141370	hindun@bappenas.go.id	Direktorat Perkotaan dan Perdesaan
4	Riau	Prakosa Graha	0818779031	prakosa.g@bappenas.go.id	Direktorat Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan
5	Kepulauan Riau	Moh. Nawaluddin	08111113434	moehamad.nawaludin@bappenas.go.id	Direktorat Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan
B	SUMATERA B				
6	Sumatera Selatan	Zulfakar	08129751969	zulfakar@bappenas.go.id	Direktorat Perkotaan dan Perdesaan
7	Bengkulu	Fidelia Silvana	081219056912	fideliass@bappenas.go.id	Direktorat Pengembangan Wilayah
8	Lampung	Mardiah Thamrin	2132645756	torrymt@bappenas.go.id	Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan
9	Bangka Belitung	Yudianto	08129353198	yudianto@bappenas.go.id	Direktorat Pengembangan Wilayah
10	Jambi	Taufik Hidayat	08128007728	taufiqhp@bappenas.go.id	Direktorat Otonomi Daerah
C	JAWA dan BALI				
11	DKI Jakarta	Endang Indriyati	08567838048	srihastuti@yahoo.com	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
12	Jawa Barat	Aswicaksana	08562188810	aswicaksana@bappenas.go.id	Direktorat Tata Ruang, dan Pertanahan
13	Jawa Tengah	Anna Amalia	081380774472	anna.amalia@bappenas.go.id	Direktorat Lingkungan Hidup
14	Di Yogyakarta	Nana Apriyana	0817137232	apriyana@bappenas.go.id	Direktorat Tata Ruang, dan Pertanahan
15	Jawa Timur	Tasliman Solihin	08159499556	ts@bappenas.go.id	Direktorat Perkotaan dan Perdesaan
16	Banten	Suprpto	085868377088	suprpto.budinugroho@bappenas.go.id	Direktorat Agama dan Pendidikan
17	Bali	Ester Fitrinika	08179803250	ester@bappenas.go.id	Direktorat Tata Ruang, dan Pertanahan

DAFTAR PENGHUBUNG PROVINSI (2)

NO	PROVINSI	PETUGAS PENGHUBUNG PROVINSI			
		NAMA	HP	Alamat Email	Unit Kerja
D	KALIMANTAN				
18	Kalimantan Barat	Ervan Arumansyah	081322116879	ervan.arumansyah@bappenas.go.id	Direktorat Otonomi Daerah
19	Kalimantan Tengah	Andi Setyo Pambudi	081331005984	andi.pambudi@bappenas.go.id	Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
20	Kalimantan Selatan	Ira Lubis	08561188142	ira.lubis@bappenas.go.id	Direktur Permukiman dan Perumahan
21	Kalimantan Timur	Ellyna Chairani	0811130022	lyna@bappenas.go.id	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
E	SULAWESI				
22	Sulawesi Utara	Sudira	08128140772	sudira@bappenas.go.id	Direktorat Otonomi Daerah
23	Sulawesi Tengah	Octal Pramudito	08562668576	octal.pramudito@bappenas.go.id	Direktorat Jasa Keuangan dan Moneter
24	Sulawesi Selatan	Agus Sutiadi	08158370560	agus.sutiadi@bappenas.go.id	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
25	Sulawesi Tenggara	Dwi Haryawan Sutrisno,	08158862101	dhariyawan@bappenas.go.id	Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
26	Gorontalo	Wariki Sutikno	081389704035	wariki@bappenas.go.id	Direktorat Otonomi Daerah
27	Sulawesi Barat	Nursyaf Rullihandia	08129083737	nursyaf.rullihandia @bappenas.go.id	Direktorat Pengairan dan Irigasi
F	KEPULAUAN TIMUR				
28	Nusa Tenggara Barat	Asep Saepudin	081584933626	asepsae@bappenas.go.id	Direktorat Otonomi Daerah
29	Nusa Tenggara Timur	Afwandi	0811134393	afwandi@bappneas.go.id	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
30	Maluku	Nirmala Shinta Dewi	081328822028	nirmala.dewi@bappenas.go.id	Biro Sumber Daya Manusia
31	Maluku Utara	Dwi Ratih Suryantining Esti	085624939392	dwi.esti@bappenas.go.id	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
32	Papua Barat	Moris Nuami	081399096911	moris@bappenas.go.id	Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal
33	Papua	Angger Anindito	0817313187	Istasius.anindito@bappenas.go.id	Direktorat Industri, Iptek dan BUMN

INFO SINGKAT MUSRENBANGNAS RKP 2011

PENGESAHAN SPPD

Kementerian Negara PPN/BAPPENAS menyediakan konter khusus untuk pengesahan SPPD. Konter ini terletak di Sekretariat Musrenbangnas RKP 2011, di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

Contact Person :

1. Budi Cahyono, HP : 0878-8230-2226
2. Titin Gantini, HP : 0858-8587-8181

TAKSI

Untuk pemesanan taksi silakan menghubungi petugas *front office* Balai Kartini yang akan membantu memesan taksi, atau hubungi taksi *BLUE BIRD GROUP* (terdiri atas taksi Morante, Cenderawasih, Pusaka Nuri, Lintas Buana, dan Pusaka Satria serta *Silver Bird* atau *Golden Bird*) pada nomor telepon (021) 7917 1234.

SAKIT DAN PERTOLONGAN P3K DAN RUMAH SAKIT

Apabila kurang sehat/sakit, di Komplek Balai Kartini; sementara yang terdekat dari Komplek Balai Kartini adalah Rumah Sakit MEDISTRA di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Contact Person :

1. Tuti Marlina, HP : 0812-9464489

SEKRETARIAT PANITIA MUSRENBANGNAS RKP 2011

Sekretariat panitia Musrenbangnas RKP 2011 berlokasi di Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal BAPPENAS, Jl. Taman Suropati No. 2-4, Jakarta-10310, Gedung Madiun, Lantai 4, Telp./Faksimile: 021-392-6249.

KONSUMSI

Konsumsi yang disediakan oleh panitia adalah konsumsi selama pelaksanaan acara, meliputi:

1. Makan malam pada hari ke-1
2. Makan siang dan snack pada hari ke-2, ke-3 dan ke-4

Contact Person :

1. Erianti Puspa, HP : 0816-938-389
2. Heni Herlina, HP : 0812-875-7100

MUSHOLLA

Apabila ingin menunaikan ibadah sholat, di Komplek Balai Kartini terdapat musholla di setiap lantai.

AKOMODASI DAN TRANSPORTASI

Seluruh biaya transportasi dari dan ke tempat pelaksanaan acara Musrenbangnas RKP 2011, serta akomodasi/penginapan peserta ditanggung oleh masing-masing peserta.

Peserta dapat menghubungi sendiri pihak hotel untuk reservasi, antara lain:

1. Hotel Bidakara, Kompleks Bidakara, Jl. Gatot Subroto, telpon (021) 8379 3555
2. Hotel Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman, telpon (021) 570 4444
3. Hotel Kartika Candra, Jl. Gatot Subroto, telpon (021) 525 0808
4. Hotel Atlet Century, Jl. Pintu Satu Senayan, telpon (021) 571 2041
5. Hotel Maharaja, Jl. Mampang Prapatan, telpon (021) 7918 0044 – 55
6. Hotel Santika, Jl. KS Tubun, Slipi, telpon (021) 533 0350
7. Hotel Grand Melia, Jl. HR Rasuna Said, telpon (021) 526 8080
8. Hotel Sultan, Jl. Gatot Subroto, telpon (021) 570 3600
9. Hotel Le Meridien, Jl. Jend. Sudirman, telpon (021) 251 3131
10. Hotel JW Marriot, Jl. Lingkar Mega Kuningan, telpon(021)5798 8888
11. Hotel Crowne Plaza, Jl. Jend. Gator Subroto Kuningan, telpon (021)526 8833
12. Hotel The Ritz Carlton, Jl. Lingkar Mega Kuningan, telpon (021) 2551 8888
13. Hotel The Park Lane, Jl Casablanca Kav.18, telpon (021) 828 2000
14. Hotel Puri Denpasar, Jl. Denpasar Selatan, No.1, Telpon (021) 5275542

Contact Person :

Soleh MHD, HP : 0812-1833-238

RESTORAN

Untuk lokasi di Komplek Balai Kartini, beberapa rumah makan pilihan dapat dikunjungi, seperti :

- Ayam Goreng SUHARTI di Jl. Kapten Tendean No. 13 Jakarta, ISTANA NAGA RESTAURANT di Jl. Gatot Subroto Kav. 12 Jakarta. Taksi dapat mengantar dalam waktu 15 menit sampai tujuan.
- Padi Cafe dan Resto, Jl. Denpasar Selatan, buka 24 jam.

MUSRENBANGNAS RKP 2011 PADA SITUS BAPPENAS

Informasi lebih rinci mengenai seluruh makalah dan bahan paparan pada seluruh persidangan Musrenbangnas RKP 2011, dapat diunduh (*download*) melalui situs Bappenas di: <http://www.bappenas.go.id/>

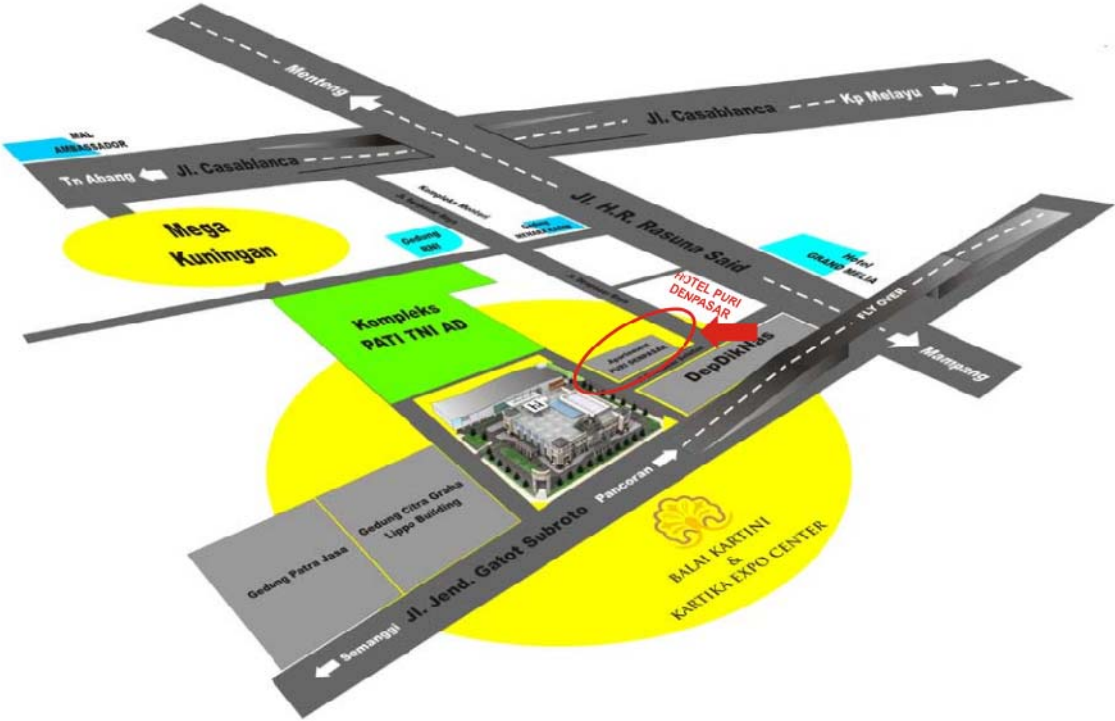
Contact Person :

1. Hari Dwi Koriyanto, HP : 0816-485-3249
2. Gatot Pambudi, HP: 0857-8167-4325

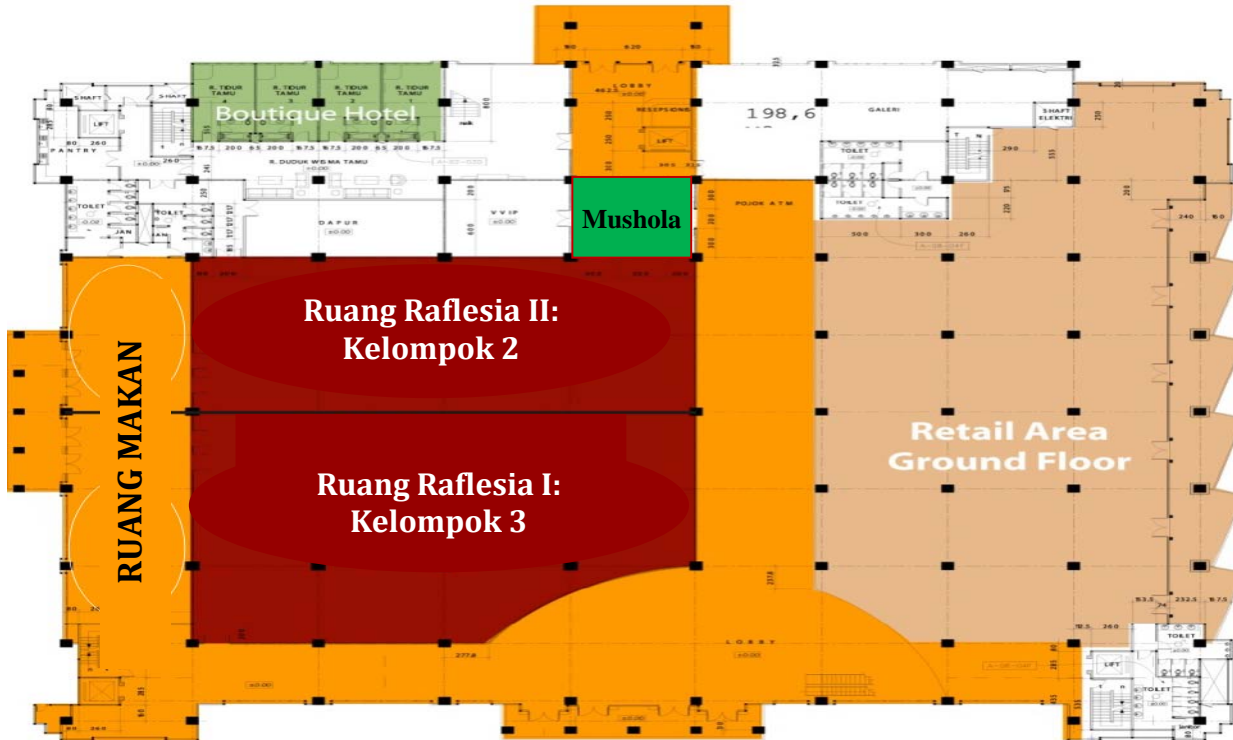
RUANG BIRAWA , BIDAKARA



DENAH BALAI KARTINI

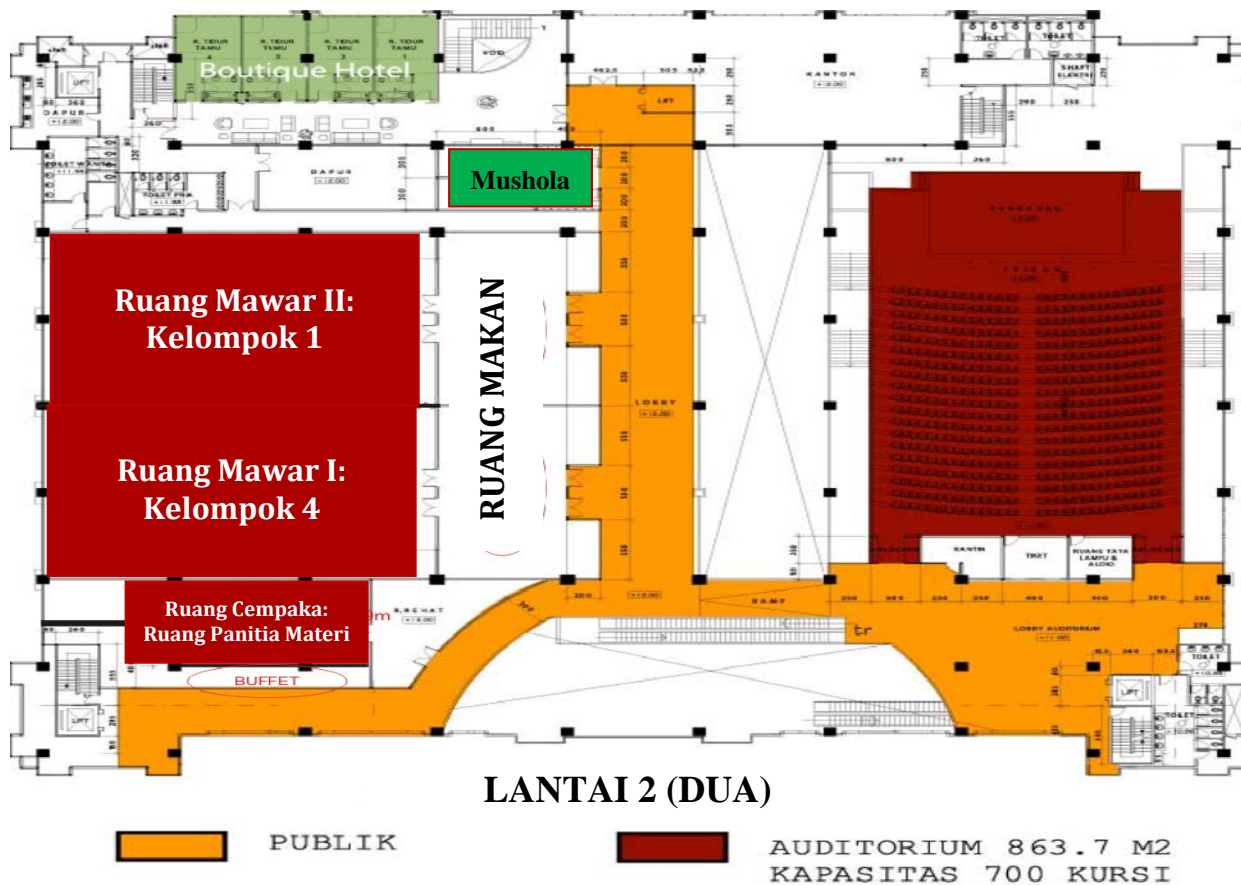


RUANG RAFLESIA I dan II , BALAI KARTINI

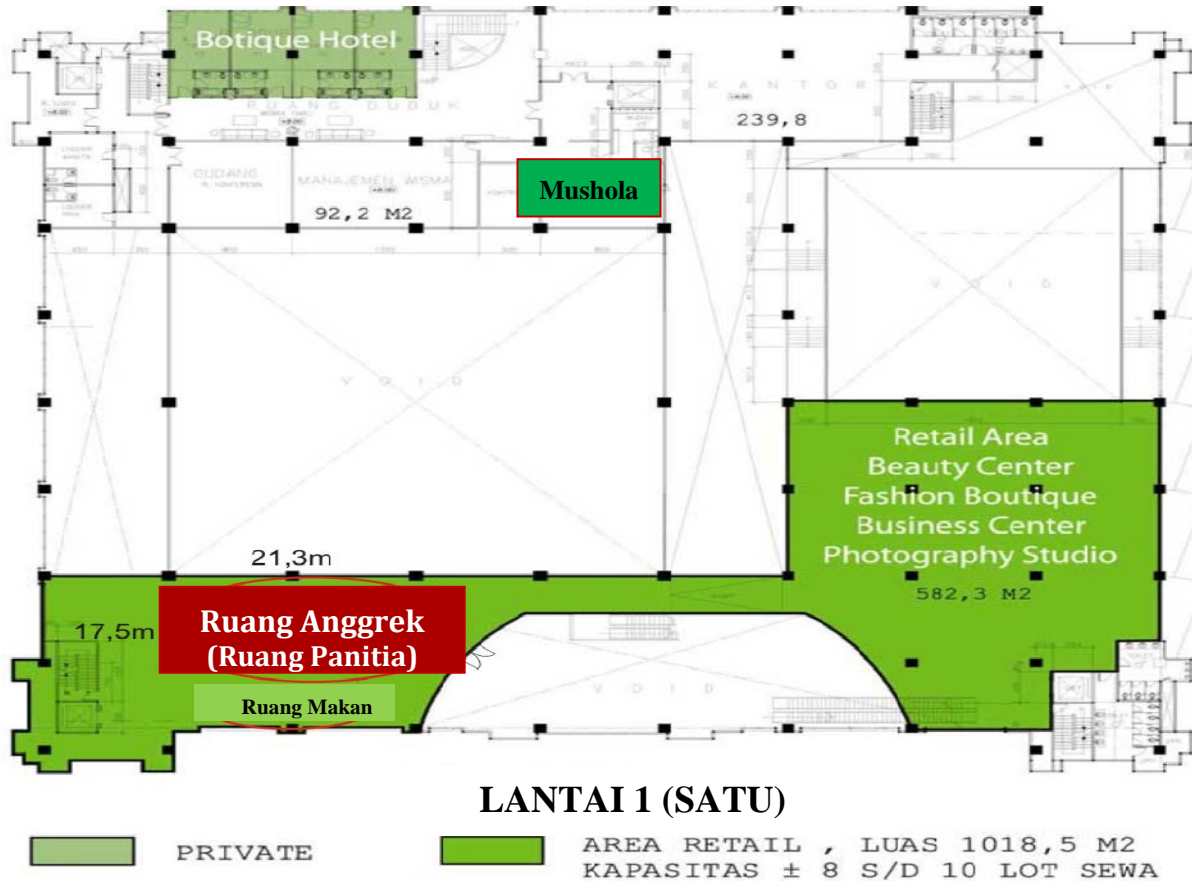


LANTAI 1 (SATU)

RUANG MAWAR I, MAWAR II dan CEMPAKA , BALAI KARTINI



RUANG ANGREK, BALAI KARTINI



DENAH PARKIR, BALAI KARTINI

